

Pemutusan perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) secara sepihak sebagai akibat wanprestasi (studi kasus putusan No. 600 K/PDT/2018) = Termination Of Build operate and transfer agreements in unilaterally as a result of breach of contract (case study on verdict No. 600 K/PDT/2018)

Nefaliana Rahma, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501512&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transfer yang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara mengenai tidak diperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitian ini adanya penyimpangan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan Tingkat Pengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masa pembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihak kedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatan dalam perjanjian dilakukannya penyimpangan Pasal 1266 KUHPerdara pihak pertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setuju bahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan wanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan Tingkat Tinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyimpangan pasal 1266 KUHPerdara tersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahan kepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan Pasal 1266 KUHPerdara dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat adanya penyimpangan dengan tidak diperlukannya putusan pengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapat mempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atau tidak.....This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge

stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not.